

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL

Akbarurizqillah Al Azhar
Akbarurizqillah39@gmail.com
Suwardi Bambang Hermanto

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to test the influence of local own resource revenue (PAD), general allocation fund (DAU), and special allocation fund (DAK) to the capital expenditure of Districts / cities government in East Java. The population of this research is all districts / cities in East Java Province in 2012-2015 periods. The purposive sampling method has been conducted by using 139 the Realization Report of Revenue Budget and Local Government Expenditure (LRA-APBD) from 29 local district governments and 9 cities governments in East Java province during the 2012-2015 fiscal periods. The result of this research is multiple linear regressions analysis technique explains that Partially 1) local own source revenue give significant and positive influence to the allocation of capital expenditure. 2) general allocation fund give significant and positive influence to the allocation of capital expenditure. 3) special allocation fund give significant and positive influence to the allocation of capital expenditure. And simultaneously the local own source revenue, general allocation fund and special allocation fund give significant and positive influence to the allocation of capital expenditure of districts / cities in East java. The value of Adjusted R Square is 0.948, it shows that the independent variables can explain the dependent variable.

Keywords: Local own source revenue, general allocation fund, special allocation fund, capital expenditure.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Populasi pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 sampai 2015. Dengan metode *purposive sampling* yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh sebanyak 139 Laporan Realisasi Anggaran-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA-APBD) dari 29 pemerintah daerah kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur selama periode tahun anggaran 2012-2015. Hasil penelitian dengan teknik analisis regresi linier berganda menjelaskan bahwa secara parsial 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal. 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal. 3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal. Dan secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal pada Kota/Kabupaten di Jawa Timur. Dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,948 menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang awalnya menggunakan sistem sentralisasi dalam pemerintahannya berubah menggunakan sistem desentralisasi dimana pemerintah daerah diberi kebebasan hak, kewajiban dan wewenang dalam mengelola daerahnya sendiri. Namun dalam pelaksanaannya, desentralisasi memiliki dua sisi penilaian, disatu sisi desentralisasi memberikan kebebasan yang luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya, akan tetapi disisi lain desentralisasi juga menimbulkan masalah baru dalam pelaksanaannya, berupa ketimpangan fiskal. Hal ini dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ketimpangan fiskal tersebut, pemerintah pusat berupaya dengan cara mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan dan Keuangan Pusat dan Daerah menegaskan bahwa pemerintah pusat akan menstransfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana Perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Disini pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengalokasikan pendapatannya kedalam semua belanja daerah secara proporsional. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah daerah lebih banyak mengeluarkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah yang sifatnya rutin saja. Rendahnya belanja modal dapat mempengaruhi kinerja berbagai badan pemerintah. Saat ini kondisi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah di Indonesia masih kurang diperhatikan, Seharusnya pemerintah daerah lebih memperhatikan bagian yang dialokasikan kepada belanja modal. Karena Jika pemerintah daerah ingin memberikan kualitas layanan publik yang baik, maka perlu adanya manfaat yang dirasakan oleh publik dimasa mendatang dengan cara membuat program-program yang memiliki manfaat dalam jangka panjang seperti pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, pembelian mobil ambulan dll.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini bertujuan untuk menambah aset tetap yang dimiliki. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Dengan terpenuhinya fasilitas publik maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal? 2) apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal? dan 3) apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal? Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah: 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain (*agent*) untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Sedangkan agen adalah pihak yang menerima dan

menjalankan perintah kontrak yang sesuai dengan keinginan pihak prinsipal (Jensen dan Smith, 1984).

Masalah keagenan akan muncul karena setiap individu mempunyai keinginan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi yang kemungkinan besar akan berlawanan dengan kepentingan individu lainnya. Untuk meminimalkan masalah keagenan yang muncul akibat perbedaan kepentingan ini maka dibuatlah kontrak antara prinsipal dan agen.

Teori keagenan dijadikan acuan utama dalam penelitian ini untuk menjelaskan konflik yang terjadi antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran daerah atau yang juga biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan utama bagi pemerintah daerah. Anggaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan. Menurut Halim dan Abdullah (2004) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana kegiatan suatu daerah, uraiannya secara rinci, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktifitas-aktifitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan, jenis kegiatan, dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:62) anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dari beberapa kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan daerah Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan publik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas beberapa unsur yaitu: (1) Anggaran Pendapatan Daerah, (2) Anggaran belanja daerah, dan (3) Pembiayaan daerah.

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan dan biaya operasional pada kelompok belanja administrasi umum (PMK No. 101 Tahun 2011).

Pada dasarnya alokasi belanja modal yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah untuk membeli aset tetap yang merupakan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk memenuhi fasilitas publik. Termasuk salah satu tujuan dari pengalokasian dana pada belanja modal adalah agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal dan berkualitas. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2011 Belanja Modal dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama: (a) Belanja Modal Tanah, (b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, (c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, (d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan (e) Belanja Modal fisik lainnya.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Darise, 2008). Sedangkan Bratakusuma (2003) mengartikan Pendapatan Asli Daerah sebagai

pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut. Jadi pendapatan asli daerah adalah pendapatan atau penerimaan yang didapatkan suatu daerah yang berasal dari sumber kekayaan daerah itu sendiri.

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan asli daerah dapat dikelompokkan menurut jenis pendapatan yaitu: a) Pajak Daerah, b) Retribusi Daerah, c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar pemerintah daerah dapat membiayai belanja daerahnya sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat terwujud. Peningkatan peran atau porsi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD tanpa membebani masyarakat merupakan salah satu indikasi keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif (Saragih, 2003).

Dana Alokasi Umum

Dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menerapkan otonomi daerah dengan cara mampu mengelola pendapatan asli daerahnya untuk memenuhi kebutuhan/belanja daerahnya. Namun dalam realisasinya pendapatan yang diperoleh tiap daerah berbeda-beda sehingga hal ini menimbulkan terjadinya ketimpangan fiskal. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah berupaya dengan cara memberikan bantuan keuangan berupa dana alokasi umum. Menurut Pipin dan Jubaedah (2005:108) "Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi".

Adapun tujuan yang termasuk didalam pengertian tersebut diatas adalah jaminan kesinambungan dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah diseluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Harapannya, agar pemerintah pusat dapat memperpendek jarak kesenjangan fiskal antara daerah yang kaya dengan daerah yang miskin.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 di jelaskan bahwa dana alokasi umum yang diterima setiap kabupaten/kota disesuaikan dengan "Formula DAU" dimana formula tersebut diperoleh atas dasar perhitungan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal diperoleh berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebutkan DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004).

Menurut Darise (2008:137) Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Yani (2008:172)

menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana yang merupakan prioritas nasional dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, dan air bersih), pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

Dari beberapa kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Dana alokasi khusus adalah dana yang diambil dari APBN diberikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga merupakan prioritas nasional seperti: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi, pendidikan, kesehatan, dll.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, yang menyebutkan bahwa mekanisme perhitungan pengalokasi Dana Alokasi Khusus dilakukan melalui 2 tahapan yaitu: (1) penentuan daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi Khusus, Dan (2) penentuan besaran pengalokasi Dana Alokasi Khusus masing-masing daerah.

Pengembangan Hipotesis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Sumber-sumber PAD dapat diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakat dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut dan pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Sehingga apabila Pemerintah daerah ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah daerah harus menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Sedangkan Tuasikal (2008) menghasilkan kesimpulan berupa secara simultan, DAU dan DAK, PAD dan PDRB berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Dan secara parsial, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja modal juga akan mengalami suatu peningkatan. Berdasarkan paparan tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 (H1) : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Hampir sama dengan PAD, DAU merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk Belanja Modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Bedanya PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan DAU berasal dari APBN yang mempunyai tujuan tertentu.

Purpitasari (2015) meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah. Dan hasil penelitian yang dilakukan purpitasari memberikan kesimpulan berupa PAD dan DAU Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Daerah. Sedangkan Afrizawati (2012) menguji *flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa besarnya nilai Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap besarnya nilai belanja daerah.

Harianto dan Adi (2007) dalam penelitian yang berjudul Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapital. Dan hasil dari penelitian mereka adalah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan Belanja Modal. Mereka menemukan bahwa kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya yaitu ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum menjadi semakin tinggi.

Dari beberapa penelitian diatas menunjukkan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja daerah khususnya belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan Dana Alokasi Umum. Berdasarkan paparan tersebut, dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 2 (H2) : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Nuarisa (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, yang kemudian salah satu kesimpulan dari hasil penelitiannya yaitu dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Antara DAK dengan belanja modal memiliki hubungan/ keterkaitan yang signifikan berupa semakin tinggi dana alokasi khusus yang diterima suatu daerah maka alokasi belanja modal daerah tersebut juga akan semakin meningkat.

Tuasikal (2008) dalam penelitiannya tentang Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal. Dan salah satu dari penelitiannya menghasilkan kesimpulan berupa Secara parsial, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

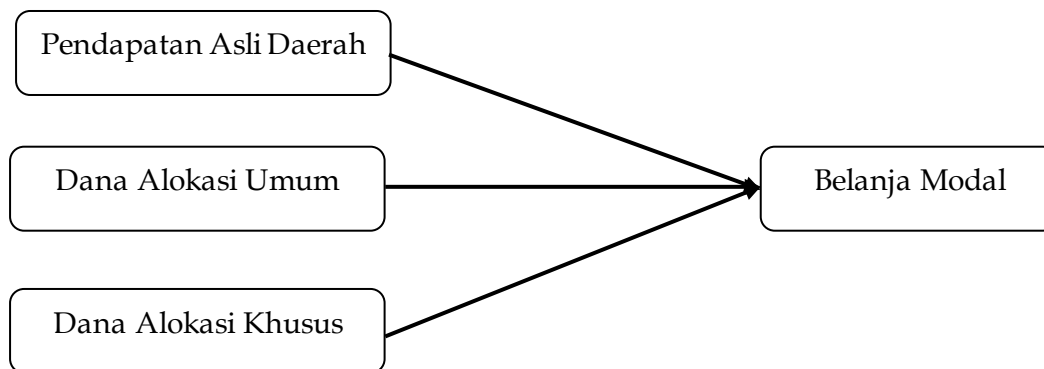
Beberapa penelitian diatas menunjukkan jika Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik, maka diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan ke dalam belanja modal.

Hal ini menunjukkan bahwa dana perimbangan berupa dana alokasi khusus ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus seperti sarana dan prasarana yang manfaatnya diperoleh dalam jangka panjang dan ini sesuai dengan kriteria belanja modal. Jadi, apabila dana alokasi khusus yang diterima pemerintah daerah itu besar maka belanja modal daerah tersebut juga akan meningkat. Berdasarkan paparan tersebut, dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 3 (H3) : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Model Penelitian

Dari hasil perumusan hipotesis dapat ditarik model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota dan obyek dari penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 hingga 2015.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang telah memasukkan Laporan Realisasi APBD (PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal) periode anggaran tahun 2012 - 2015 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui media perantara atau pihak lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen Laporan Realisasi APBD tahun 2012 - 2015 yang diperoleh dari instansi pemerintahan (BPK dan BPS).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal, sedangkan variabel independennya adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Variabel Dependen

Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya

pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Variabel dependen belanja modal dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

Belanja Modal = Belanja Modal Tanah + Belanja Modal Peralatan dan Mesin + Belanja Modal Gedung dan Bangunan + Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Modal fisik lainnya.

Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2002:96). Sumber pendapatan asli daerah dapat dikelompokkan menurut jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Selain untuk mewujudkan asas desentralisasi, Dana Alokasi Umum juga bertujuan untuk meminimalkan kesenjangan fiskal antar daerah.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Yang dimaksud kegiatan khusus disini adalah kegiatan yang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Jadi besaran Dana Alokasi Khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Model analisis ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk mengukur kekuatan hubungan antara tiga variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu datanya di uji dalam uji asumsi klasik yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memenuhi syarat yang telah ditentukan. Setelah persyaratan regresi linier berganda dari uji asumsi klasik telah terpenuhi maka pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan. Adapun model rumus persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BMO = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + e$$

Keterangan :

- BMO = Belanja Modal (BMO)
- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)
- DAK = Dana Alokasi Khusus (DAK)
- e = Standar error

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan Kota Surabaya sebagai Ibukota Provinsi. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai Provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Jawa Timur mempunyai posisi yang strategis di bidang Industri karena diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Tengah dan Bali, sehingga menjadi pusat pertumbuhan industri maupun perdagangan. Masyarakat Jawa Timur memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan. Hal ini terekspresikan pada pepatah “ JER BASUKI MAWA BEYA” , yang berarti untuk mencapai suatu kebahagiaan diperlukan pengorbanan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten Dan 9 Kota. Sedangkan Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan realisasi anggaran APBD tahun 2012 sampai 2015 yang disampaikan oleh masing-masing kabupaten/kota kepada BPK-RI dan BPS Provinsi Jawa Timur. Sampel atau data (n) dalam penelitian ini sebanyak 139 yang diperoleh dari 38 Pemerintah Kabupaten/Kota dikali 4 tahun periode data pengamatan dikurangi 2 Pemerintah Kabupaten/Kota yang laporan realisasi anggaran APBDnya pada tahun 2015 masih dalam proses pemeriksaan di kejaksaan sehingga datanya belum bisa diberikan oleh BPK-RI. Setelah dilakukan seleksi data, maka dapat diketahui terdapat 11 data *outliers* pada penelitian ini. Sehingga data yang digunakan dalam sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Prosedur Penentuan Sampel

| No. | Keterangan | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Jumlah Sampel |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 1 | Laporan Realisasi APBD Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur | 38 | 38 | 38 | 38 | 152 |
| 2 | Kab/Kota yang belum menyampaikan Laporan Realisasi APBD | | | | (2) | (2) |
| 3 | Data Outliers | (2) | (2) | (2) | (5) | (11) |
| 4 | Total sampel yang dapat digunakan | 36 | 36 | 36 | 31 | 139 |

Sumber: Data Sekunder Diolah

Analisis Statistik Deskriptif

Penyajian analisis statistik deskriptif memberikan gambaran pada suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standard deviasi, maksimum, dan minimum. Berikut tabel 1 yang menjelaskan tentang hasil pengujian statistik dalam penelitian ini.

Tabel 2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
(Dalam Ribuan)
Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|-----------------------|-----|-------------|---------------|-------------|----------------|
| PAD | 139 | 38.794.059 | 4.035.649.478 | 268.247.671 | 497.253.802 |
| DAU | 139 | 309.102.871 | 1.613.161.777 | 824.223.929 | 275.072.609 |
| DAK | 139 | 424.100 | 199.158.010 | 64.735.751 | 34.873.978 |
| BMO | 139 | 65.462.125 | 1.785.125.255 | 298.822.609 | 222.297.524 |
| Valid N (listwise) | 139 | | | | |

Sumber: Data Sekunder Diolah

Berdasarkan tabel 2 tentang pengujian statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa nilai yang minimum adalah 38.794.059 dan maximum adalah 4.035.649.478. Rata-rata variabel pendapatan asli daerah pada Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 268.247.671 dan standar deviasi sebesar 497.253.802. Berdasarkan data yang diperoleh selama periode tahun 2012-2015 diketahui bahwa hampir semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur pendapatan asli daerahnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ini menunjukkan bahwa daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur memiliki kemampuan yang baik dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya.

Pada variabel dana alokasi umum menunjukkan bahwa nilai yang minimum adalah 309.102.871 dan maximum adalah 1.613.161.777. Rata-rata dana alokasi umum dalam penelitian ini adalah sebesar 64.735.751. Standar deviasi dana alokasi umum Provinsi Jawa Timur dalam penelitian ini sebesar 275.072.609.

Pada variabel dana alokasi khusus menunjukkan bahwa nilai yang minimum adalah 424.100 dan maximum adalah 199.158.010. Rata-rata dana alokasi khusus dalam penelitian ini adalah sebesar 634,044.45. Standar deviasi dana alokasi khusus Provinsi Jawa Timur dalam penelitian ini sebesar 34.873.978.

Pada variabel belanja modal menunjukkan bahwa nilai yang minimum adalah 65.462.125 dan maximum adalah 1.785.125.255. Rata-rata variabel belanja modal Provinsi Jawa Timur dalam penelitian ini adalah sebesar 298.822.609 dan standar deviasi sebesar 222.297.524.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Hasil pada grafik normal *probability plot* menunjukkan bahwa titik-titik menyebar mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi ini dianggap memenuhi asumsi normalitas. Namun perlu dipahami uji normalitas grafik dapat menyesatkan, secara visual kelihatan normal padahal secara statistik belum tentu normal. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian statistik lagi dengan cara melakukan uji *one sampel Kolmogorov-Smirnov test*. Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,200 lebih besar dari 0,05 hal ini berarti data tersebut memang benar terdistribusi secara normal.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji Autokorelasi menunjukkan bahwa nilai D-W adalah 1.434 dengan ketentuan angka D-W dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika angka D-W tersebut berada diantara -2 sampai +2 sedangkan angka D-W yang diperoleh pada tabel di atas adalah 1.434 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi dalam model regresi tersebut.

Uji Multikoloniaritas

Berdasarkan hasil Uji Multikolonieritas menunjukkan bahwa variabel independen yaitu PAD, DAU, dan DAK mempunyai angka VIF dibawah angka 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 10% (0,10). Hal ini berarti bahwa model regresi yang dipakai untuk variabel diatas tidak terdapat persoalan multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pola grafik scatterplot. Hasil dari grafik scatterplot menunjukkan adanya titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, tidak ada pola tertentu yang teratur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

Analisis Regresi Linier Berganda Pengujian Parsial (Uji t)

Uji Parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing - masing variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil perhitungan statistik pada pengujian parsial ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 3
Hasil Pengujian Parsial (Uji t)
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 (Constant) | -14594473 | 13867941 | | -1.052 | .295 |
| PAD | .386 | .010 | .863 | 37.443 | .000 |
| DAU | .165 | .023 | .205 | 7.230 | .000 |
| DAK | 1.136 | .170 | .178 | 6.674 | .000 |

a. Dependent Variable: BMO

Sumber: Data Sekunder Diolah

Berdasarkan hasil pengujian parsial pada tabel 3 diatas maka dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{BMO} = -14.594.473 + 0,386 \text{ PAD} + 0,165 \text{ DAU} + 1,136 \text{ DAK}$$

Model regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Konstanta sebesar -14.594.473 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap nol atau tidak ada, maka rata-rata belanja modal setiap daerah di Jawa Timur sebesar -14.594.473

2. Koefisien regresi PAD sebesar 0,386 menyatakan bahwa setiap peningkatan variabel PAD sebesar 1% akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,386 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.
3. Koefisien regresi DAU sebesar 0,165 menyatakan bahwa setiap peningkatan variabel DAU sebesar 1% akan meningkatkan belanja modal sebesar 0,165 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.
4. Koefisien regresi DAK sebesar 1,136 menyatakan bahwa setiap peningkatan variabel DAK sebesar 1% akan meningkatkan belanja modal sebesar 1,136 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol.

Pengujian Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.. Hasil Uji Statistik F dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4
Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

| ANOVA^a | | | | | | |
|--------------------------|------------|----------------|-----|-------------|---------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 647137000 | 3 | 215712000 | 836.672 | .000 ^b |
| | Residual | 34806000 | 135 | 257822 | | |
| | Total | 681943000 | 138 | | | |

a. Dependent Variable: BMO

b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

Sumber: Data Sekunder Diolah

Hasil Uji statistik F pada tabel 4 diatas menunjukkan bahwa model regresi tersebut menghasilkan nilai f hitung sebesar 836,672 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini berarti tingkat signifikansi $f \leq 0,05$ yang artinya H_1 diterima dan H_0 ditolak maka dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Koefisien Determinasi (Uji R²)

Uji Koefisien Determinasi (R²) bertujuan untuk menguji sejauh mana tingkat keterikatan atau kontribusi variabel PAD, DAU, dan DAK terhadap variabel belanja modal yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*adjusted R-square*). Adapun Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .974 ^a | .949 | .948 | 50776178.470 |

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BMO

Sumber: Data Sekunder Diolah

Berdasarkan tabel 5 diatas, diperoleh nilai R sebesar 0,974 (97,4%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU, dan DAK mempunyai hubungan yang erat dengan variabel Belanja Modal. Dasar untuk mengatakan variabel independen memiliki

hubungan yang erat dengan variabel dependen adalah jika nilai R yang diperoleh diatas 50%. Sedangkan nilai adjusted R² atau koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,948 hal ini menunjukkan besarnya pengaruh variabel PAD, DAU, dan DAK mampu dijelaskan oleh variabel Belanja Modal sebesar 94,8% sedangkan sisanya sebesar 5,2% dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Berikut ini adalah pembahasan dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil perhitungan pengujian hipotesisi diketahui bahwa:

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan dalam Uji t pada tabel 3 dimana variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t-hitung sebesar 37.443 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa (H1) diterima yang artinya bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Alasan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal adalah karena Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki termasuk salah satunya dengan cara meningkatkan pembangunan infrastuktur dan sarana prasarana sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan dalam Uji t pada tabel 3 dimana variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai t-hitung sebesar 7.230 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa (H2) diterima yang artinya bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Alasan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal adalah karena tujuan dari Dana Alokasi Umum adalah untuk menyediakan dana yang cukup bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan daerahnya. Diberikannya bantuan Dana Alokasi Umum ini karena tidak meratanya kemampuan keuangan antar daerah. Dana Alokasi Umum bersifat "*block grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Bagi pemerintah daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang kecil, Dana Alokasi Umum sangat berperan penting bagi pemerintah daerah untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat meningkatkan pembangunan daerahnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purpitasari (2015) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan dalam Uji t pada tabel 3 dimana variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai t-hitung sebesar 6.674 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa (H3) diterima yang artinya bahwa variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Alasan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal adalah karena Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 Tahun 2004).

Termasuk salah satu Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada tahun 2012-2015 maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan ketiga variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap variabel dependen (belanja modal) dan secara parsial, masing-masing variabel independen tersebut berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

Saran

Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa timur diharapkan untuk dapat meningkatkan penggalan potensi-potensi sumber pendapatan asli daerahnya. Hal ini dikarenakan jika pendapatan asli daerah melimpah maka pemerintah daerah tersebut akan lebih mudah dalam mengalokasikan pendapatannya pada sektor belanja modal yang didalamnya mencakup infrastruktur dan sarana prasarana. Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakat.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih mengembangkan penelitian ini dengan variabel yang lebih lengkap dan bervariasi. Seperti variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Dana Bagi Hasil (DBH), atau dapat juga menambah variabel lain selain keuangan seperti kebijakan pemerintah dan kondisi makro ekonomi. Dan juga disarankan untuk memperluas objek penelitian tidak terbatas hanya pada Provinsi Jawa Timur saja, sehingga hasil penelitiannya dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizawati. 2012. Analisis *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi* 2(1): 21-30
- Badan Pemeriksa keuangan. 2012. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. BPK RI Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo.

- _____. 2013. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. BPK RI Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo.
- _____. 2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. BPK RI Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo.
- _____. 2015. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. BPK RI Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo.
- Badan Pusat Statistik. 2012-2014. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*. <http://jatim.bps.go.id>. 29 Desember 2016. (09:52).
- Bratakusuma, S. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. PT Indeks. Jakarta.
- Darwanto dan Y. Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*. 26-28 Juli: 5-10.
- Halim, A. 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, A. dan S. Abdullah. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemda (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali). *Jurnal Ekonomi STEI 2* (25): 20-25.
- Hariato, D. dan P. H. Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapital. *Simposium Nasional Akuntansi X Makasar*. 26-28 Juli: 23-35
- Jensen, M. C. dan C. W. Smith. 1984. *The Theory Of Corporate Finance: A Historical Overview*. Mc Graw Hill. New York.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nuarisa, S. A. 2012. Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal 2*(1): 90-92
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 26 Oktober 2007. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2011 *Tentang Klasifikasi Anggaran*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 *Tentang Dana Perimbangan*. 9 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Jakarta
- _____. Nomor 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. 9 Desember 2005.
- Pipin, S. dan D. Jubaedah. 2005. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Purpitasari, P. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi 4*(11): 1-16
- Saragih, J. P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Tuasikal, A. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi 1*(2): 142-155
- Undang - Undang Nomor. 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Yani, A. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.